

Judul : Pengusul Hak Angket Minoritas
Tanggal : Jumat, 24 Februari 2017
Surat Kabar : Republika
Halaman : 4

Pengusul Hak Angket Minoritas

● FAUZIAH MURSID

Usulan hak angket memenuhi syarat.

JAKARTA — Fraksi Gerindra DPR menilai pengajuan hak angket terkait pengaktifan Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sebagai gubernur DKI sudah tepat. Ketua Fraksi Gerindra DPR Ahmad Muzani menjelaskan, dasar hak angket ini adalah ketidakpuasan terhadap penjelasan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait pengaktifan ini.

Ia menilai perlu penjelasan lebih dalam terkait alasan pemerintah kembali mengaktifkan Ahok. Hal ini ditempuh dengan hak angket. "Menurut hemat kami, perlu ada keterangan lanjutan yang harus diperjelas kembali," ungkap Muzani, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (23/2).

Muzani mengatakan, usulan hak angket sudah memenuhi syarat. Usulan itu minimal telah ditandatangani 25 anggota DPR dari dua fraksi. Sejauh ini, kata dia, sudah ada 93 anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, PKS, Partai Demokrat, dan PAN yang menyetujui hak angket.

Namun, ia mengakui, dari sisi jumlah, pengusul hak angket masih minoritas daripada suara mayoritas lainnya. Pembahasan hak ini akan melalui rapat paripurna setelah masa reses selesai. Rapat paripurna penutupan masa sidang kali ini baru beragendakan pembacaan surat usulan hak angket.

Pembacaan usulan hak angket ini diwarnai berbagai tanggapan. Meski rapat paripurna membacakan usulan hak angket yang diajukan oleh Fraksi PKS, sejumlah anggota DPR turut memberikan tanggapannya.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon mengatakan, ada surat dari pengusul hak angket anggota DPR tertanggal 13 Februari 2017. Isinya mengenai penyampaian usulan penggunaan hak angket tentang pengaktifan Basuki sebagai gubernur DKI Jakarta.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Johnny G Plate meminta hak angket ini dicabut.

"Kami mengimbau dan mendorong kepada rekan-rekan pengusul hak angket tersebut agar mengurungkan aksinya dan mencabut usulan yang sudah diucapkan," kata Johnny.

Parlemen perlu ikut menjaga suasana agar tetap kondusif dan menjaga stabilitas politik dalam negeri. Apalagi, proses pilkada serentak belum selesai. Selain itu, proses pengadilan Ahok juga masih berlangsung.

Johnny menilai, landasan yang digunakan dalam mengusulkan hak angket masih sangat minor dan belum akurat. Sebab, persidangan masih berlangsung dan belum ada dakwaan tunggal. Pihaknya mengimbau pengusul hak angket mencabut kembali usulannya.

Tanggapan berbeda muncul dari anggota DPR Fraksi PKS, Refrizal. Ia mengingatkan kepada segenap peserta rapat paripurna, salah satu fungsi yang melekat dengan DPR adalah pengawasan. Hal itu pula yang tengah dilakukan segenap anggota DPR melalui hak angket ini. "Kami mengajukan ini karena menduga presiden telah melanggar UU Nomor 23 Tahun 2014, Pasal 83 ayat 1, 2, dan 3," ujarnya.

Jika memang ada perbedaan pandangan dari anggota DPR terkait hal tersebut, sebaiknya diputuskan dalam paripurna selanjutnya. Sebab, persyaratan usulan penggunaan hak angket yang diajukan sejumlah anggota DPR, terutama dari Fraksi PKS, telah memenuhi syarat.

"Kawan-kawan yang ingin hak angket ini tidak diteruskan, mudah saja, dinonaktifkan saja Basuki, sudah kehilangan ruh hak angket ini. Saya juga akan *legowo* menarik diri dari hak angket ini," kata dia.

Usulan hak angket bermula dari pengaktifan kembali Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta pada pertengahan Februari. Hal itu menuai kontroversi karena Ahok merupakan terdakwa penistaan agama yang kasusnya masih dalam persidangan.

Mendagri Tjahjo Kumolo sebelumnya berkeras tetap mengaktifkan Ahok sebagai gubernur. Dia baru akan menonaktifkan Ahok bila jaksa menuntut Ahok dengan ancaman kurungan penjara lima tahun. ■ ed: erdy nasrul